Vol. 2 No. 1 Edisi Januari 2026 E.ISSN. 3089-8480

Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijis/index
Email: admin@jurnalcenter.com

REFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: DINAMIKA HISTORIS, TRANSFORMASI KELEMBAGAAN, DAN TANTANGAN KONTEMPORER

REFORM OF ISLAMIC EDUCATION IN INDONESIA: HISTORICAL DYNAMICS, INSTITUTIONAL TRANSFORMATION, AND CONTEMPORARY CHALLENGES

Herawati[1*]

[1*]Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Email : herawati.myway123@gmail.com

*email koresponden: herawati.myway123@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.62567/ijis.v2i1.2237

Abstract

Islamic education in Indonesia has undergone a long and dynamic process of reform, evolving alongside social, political, and national education policy changes. This article aims to analyze the development of Islamic education reform in Indonesia from its early stages to the contemporary era, highlighting driving factors, the direction of change, and the challenges faced. The method used is a literature review, examining various relevant scientific sources, including government policies and previous research findings. The study results indicate that Islamic education reform not only touches on institutional and curriculum aspects, but also teaching methods, the integration of religious and general sciences, and the improvement of human resource quality. However, these reforms still face various obstacles, such as quality disparities, limited facilities, and the challenges of globalization. This article is expected to contribute theoretically and practically to the development of Islamic education in Indonesia.

Keywords : *educational reform, Islamic education, education policy, Indonesia.*

Abstrak

Pendidikan Islam di Indonesia mengalami proses reformasi yang panjang dan dinamis seiring dengan perubahan sosial, politik, dan kebijakan pendidikan nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan reformasi pendidikan Islam di Indonesia dari masa awal hingga era kontemporer, dengan menyoroti faktor pendorong, arah perubahan, serta tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, termasuk kebijakan pemerintah dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa reformasi pendidikan Islam tidak hanya menyentuh aspek kelembagaan dan kurikulum, tetapi juga metode pembelajaran, integrasi ilmu agama dan umum, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, reformasi

Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijis/index
Email: admin@jurnalcenter.com

tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketimpangan mutu, keterbatasan sarana, dan tantangan globalisasi. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Kata Kunci : reformasi pendidikan, pendidikan Islam, kebijakan pendidikan, Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan kecakapan intelektual peserta didik. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan Islam dituntut untuk terus beradaptasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Reformasi pendidikan Islam menjadi keniscayaan, terutama dalam menghadapi perubahan kebijakan pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia.

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan adanya proses transformasi yang berkelanjutan, mulai dari sistem pendidikan tradisional berbasis pesantren hingga integrasi lembaga pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Reformasi yang terjadi tidak bersifat linier, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk kebijakan pemerintah, tuntutan masyarakat, dan perkembangan pemikiran keislaman. Oleh karena itu, kajian mengenai reformasi pendidikan Islam penting dilakukan untuk memahami arah dan implikasinya bagi masa depan pendidikan Islam di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pendidikan, dan laporan penelitian yang relevan dengan tema reformasi pendidikan Islam di Indonesia (Nugraha, 2025). Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan dinamika reformasi pendidikan Islam serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Faktor-Faktor yang Mendorong reformasi Pendidikan Islam di Indonesia

Munculnya pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, baik dalam bidang agama, sosial, maupun pendidikan, dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran Islam di berbagai negara Muslim, terutama Mesir, Turki, dan India, serta kondisi sosial-politik di Indonesia pada saat itu. Pembaharuan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan, yaitu:

1) Faktor eksternal: Reformasi pendidikan Islam di Timur Tengah pada awal abad ke-20 memberikan dampak yang signifikan mempengaruhi gerakan pembaruan di kalangan

Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijis/index
Email: admin@jurnalcenter.com

ulama dan intelektual Muslim Indonesia, yang mendorong pembaruan dalam metodologi pengajaran dan kurikulum madrasah, serta gerakan perlawanan terhadap penjajah.

2) Faktor internal: Adanya perlawanan nasional terhadap kolonialisme Belanda. Meskipun Belanda merasa khawatir terhadap gerakan Pan-Islamisme, mereka hampir tidak menerima ide tersebut. Pertentangan terhadap kolonialisme cenderung bersifat nasionalis. Selain itu, upaya yang kuat dari masyarakat Islam untuk memperkuat organisasi mereka di bidang sosial ekonomi, dan keinginan yang kuat untuk memperbaharui memperbarui pendidikan Islam. Banyak individu dan organisasi Islam merasa tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari Al-Quran dan agama Islam, sehingga pada awal abad ke-20, mereka berusaha meningkatkan sistem pendidikan Islam dan mencari cara untuk menyediakan pendidikan umum bagi masyarakat Muslim.

b. Reformasi Pendidikan Islam di Indonesia

1) Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan-Kerajaan

Sejak awal perkembangan Islam, pendidikan telah menjadi perhatian utama bagi masyrakat Muslim di Indonesia. Proses islamisasi menjadi alasan utama dalam penyelenggaraan pengajaran Islam. Kebutuhan akan pendidikan di kalangan masyarakat Muslim mendorong mereka untuk mengadopsi dan mengubah lembaga-lembaga keagamaan serta sosial yang sudah ada menjadi lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Islamisasi dan pendidikan Islam yang berkembang pesat di Nusantara pada masa itu berhasil membentuk masyarakat Muslim yang memicu munculnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah tersebut. Beberapa kerajaan Islam yang ada sebelum masa penjajahan meliputi: Kerajaan Perlak, Kerajaan Pasai, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Siak di Sumatera. Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram di Jawa. Ada juga kerajaan kembar Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan.

Pada tahap awal perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, terdapat beberapa lembaga pendidikan Islam, yaitu:

a) Masjid dan Langgar : Kedua tempat ini berfungsi sebagai tempat ibadah sekaligus pusat pendidikan informal. Di masjid dan langgar, para muballigh memberikan pengajaran agama dan mencontohkan akhlak yang baik kepada masyarakat.
b) Pesantren: Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang lebih terorganisir, di mana santri belajar tentang agama serta ilmu pengetahuan lainnya. Pesantren menjadi pusat pendidikan yang signifikan, terutama di Jawa dan daerah lainnya.
c) Meunasah, Dayah dan Rangrang: Di Aceh, meunasah berfungsi sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Lembaga ini mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Meunasah pada awalnya berfungsi sebagai tempat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi sarana pendidikan dasar bagi anak-anak masyarakat Aceh untuk belajar membaca al-Qur'an. Setelah belajar di meunasah, para murid melanjutkan pendidikan agama mereka ke tingkat yang lebih tinggi di rangkang, yang umumnya dibangun di sekitar masjid. Pendidikan selanjutnya berlangsung di dayah, sebuah lembaga pendidikan Islam bagi mereka yang ingin mendalami ilmu agama Islam lebih dalam.

Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijis/index
Email: admin@jurnalcenter.com

d) Surau: Di Minangkabau, surau berfungsi sebagai tempat berkumpul bagi masyarakat untuk belajar agama dan melakukan kegiatan sosial. Surau juga menjadi lokasi pendidikan informal bagi anak-anak.

Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam proses Islamisasi dan pendidikan masyarakat Muslim di Indonesia, meskipun pada awalnya pendidikan berlangsung secara informal dan sederhana.

2) Pendidikan Islam pada Masa Kolonial

Pada periode pra kemerdekaan, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda dan Jepang terhadap pendidikan Islam sangat diskriminatif. Kebijakan ini merupakan bagian dari kepentingan mereka sebagai penjajah dalam konteks politik kolonial. Diskriminasi ini juga berakar dari ketakutan penjajah terhadap umat Islam, yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Dalam sejarah, terlihat jelas bahwa umat Islam sangat menentang penjajahan oleh Belanda dan Jepang.

a) Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Belanda

Strategi penjajahan Belanda terhadap pendidikan pribumi Islam di Indonesia, yang dikenal dengan Politik Etis pada tahun 1900, bertujuan untuk mempertahankan dominasi kolonial dengan cara membodohi masyarakat pribumi. Meskipun secara teori Politik Etis mengklaim sebagai bentuk balas budi untuk pengorbanan rakyat Jawa dan Sunda selama masa Tanam Paksa, kenyataannya Belanda tetap berusaha mempertahankan superioritas mereka melalui kebodohan rakyat, tujuan Belanda adalah membangun kekuasaan mereka di atas ketidaktahuan pribumi.

Sistem pendidikan yang diterapkan oleh Belanda bertujuan untuk menjaga ketertinggalan pribumi, dengan melarang penggunaan bahasa Belanda oleh masyarakat Islam dan menggantikannya dengan bahasa Melayu yang menjadi bahasa persatuan. Selain itu, Belanda juga melancarkan Politik Asosiasi, yang berupaya merusak ikatan budaya Islam dengan mengadopsi pendekatan budaya Barat, sehingga generasi muda pribumi kehilangan jati dirinya.

Kebijakan diskriminatif Belanda terlihat jelas dalam perbedaan fasilitas pendidikan antara anak pribumi dan anak Eropa atau bangsa Timur Asing. Sekolah-sekolah untuk anak pribumi Islam mendapatkan subsidi yang sangat minim, meskipun jumlah murid pribumi jauh lebih besar. Sebaliknya, sekolah-sekolah Kristen dan sekolah-sekolah untuk etnis Cina mendapat subsidi yang lebih besar, memperparah ketidaksetaraan dalam pendidikan. Diskriminasi ini berkontribusi pada perpecahan sosial dan ketimpangan antara kelompok-kelompok masyarakat.

Selain itu untuk mematahkan hubungan umat Islam denga Timur Tengah maka para sultan dan bupati yang tidak pernah naik haji dan masyarakatnya yang tidak ada yang naik haji, memperoleh bintang kehormatan dari pemerintah kolonial Belanda. Tujuan trategisnya adalah hanya dengan mengisolasi hubungan dengan gerakan reformasi Islam di Timur Tengah, pengaruh pendidikan Islam di Nusantara akan semakin kehilangan daya juangya.5

Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijis/index
Email: admin@jurnalcenter.com

Usaha-usaha yang dilakukan pemeritah kolonial Belanda teryata tidak sepenuhnya berhasil untuk memadamkan semangat para ulama untuk memberikan pendidikan Islam kepada masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya lembaga-lembaga pesantren yang tetap berdiri kokoh meski ditengah tekanan politik penjajah, diantaranya adalah: Pesantren Lengkon dan Punjul di Cirebon, Pesantren Pesantren Daya Luhur di Tegal, Pesantren Brangkal di Bagelen, Pesantren Tegalsari dan Banjarsari di Madiun, dan Pesantren Sida Cerma di Surabaya.

Sampai awal abad ke-20 M, masyarakat pribumi umumnya buta huruf latin. Mereka hanya mengenal huruf arab AL-Qur'an, huruf Arab Melayu, atau huruf daerah. Hal ini terajdi sebagai dampak betapa kuatnya pengaruh ulama dan pesatren sebagai lembaga pencerdas bangsa. Ajaran kejuangan pesantren melahirkan kekuatan Isalm yang integratif, pengaruh ajaran ulama mengubah jiwa sukuisme menjadi nasionalisme.

b) Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Jepang

Pasca terusirnya Belanda dari bumi Indonesia oleh Jepang pada tahun 1942, sebagai penguasa baru bangsa ini, Jepang mengeluarkan kebijakan pendidikan Islam yang pada awalnya seakan-akan berpihak terhadap umat Islam, namun sebenarnya mempunyai kepentingan agar umat Islam berpihak kepada Jepang dalam perang Dunia II.

Pendidikan Islam selama masa penjajahan Jepang mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu perubahan utama adalah penggantian bahasa pengantar dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, yang memberikan akses lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Jepang juga menghilangkan sistem pendidikan yang berbasis kelas sosial yang diterapkan oleh Belanda, sehingga pendidikan Islam dapat berkembang dengan lebih leluasa.

Pada masa ini, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga mencakup pelatihan fisik dan militer. Siswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan indoktrinasi militer. Hal ini mencerminkan upaya Jepang untuk mempersiapkan generasi muda sebagai bagian dari kekuatan militer mereka. Namun, pondok pesantren yang tidak berada di bawah pengawasan langsung pemerintah Jepang tetap dapat memberikan pendidikan yang berkualitas, berfungsi sebagai tempat untuk membentuk mentalitas santri dan mempersiapkan mereka sebagai pejuang untuk kemerdekaan, sehingga tanpa disadari oleh Jepang sendiri bahwa umat Islam sudah cukup mempunyai potensi untuk maju dalam bidang pendidikan ataupun perlawanan kepada penjajah.

Meskipun terdapat kemajuan dalam pendidikan Islam selama masa penjajahan Jepang, tantangan tetap ada, termasuk tekanan dari tentara Jepang dan kurangnya dukungan finansial untuk lembaga pendidikan.

3) Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama

Periode Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1966. Pada periode ini, kurikulum ditetapkan berasaskan pancasila yang dikenal dengan "Rencana Pelajaran

Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijis/index
Email: admin@jurnalcenter.com

1947". Kurikulum ini mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itulah kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam lebih baik dari pada pra kemerdekaan (masa kolonial). Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya keputusan yang dihasilkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang mengusulkan kepada kementerian PP&K pada tanggal 29 Desember 1945, bahwa pendidikan agama menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional yang diajarkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Keputusan ini merupakan langkah pertama dalam sejarah Indonesia, pasca kemerdekaan.

Pada tahun 1947, Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama (MPPA) yang menghasilkan keputusan bahwa pendidikan agama melalui kurikulum 1947 yang berlaku sampai dengan tahun 1952 masuk ke dalam setiap jenjang pendidikan, mulai dari kurikulum Sekolah Rakyat, kurikulum SMP, dan kurikulum SMA.

Pada tahun 1951, pemerintah Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan aturan mengenai pendidikan agama di sekolah-sekolah.

Kemudian pendidikan Islam menemukan eksistensinya ketika TAP MPRS No. 2 tahun 1960 menetapkan bahwa: "Pemberian pelajaran agama pada semua tingkat pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi Negeri", di samping pengakuan bahwa "Pesantren dan Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang otonom di bawah pembinaan Depatemen Agama.

Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Orde Lama sudah berupaya untuk melakukan pembenahan terhadap kebijakan pendidikan Islam, namun akibat suhu politik yang tidak kondusif, di antaranya akibat adanya pertentangan antara kelompok nasionalis, sekuler-komunis, dan Islam, hal itu berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan Islam.

4) Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru

Pada awal pemerintahan Orde Baru, pendidikan Islam Madrasah tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, pengakuan terhadap Madrasah mulai terjadi di era Soeharto dengan diterbitkannya Keppres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974, yang mengatur pengelolaan Madrasah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebelumnya berada di bawah Departemen Agama.

Kebijakan ini mendapat penolakan kuat dari umat Islam, yang mengarah pada dikeluarkannya SKB 3 Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri) pada 24 Maret 1975, yang mengembalikan status Madrasah di bawah Kementerian Agama. Penegasan ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Madrasah adalah sekolah umum yang berkarakter Islam.9 Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, madrasah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Ini menandai pergeseran dari pandangan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang terpisah menjadi bagian integral dari pendidikan nasional.

Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijis/index
Email: admin@jurnalcenter.com

Pada era ini, madrasah mulai menerapkan kurikulum yang disusun oleh pemerintah, yang sejalan dengan kurikulum sekolah umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah dan memastikan bahwa lulusan madrasah memiliki kompetensi yang setara dengan lulusan sekolah umum. Meskipun demikian, madrasah tetap diizinkan untuk mengajarkan pelajaran agama, sehingga mereka dapat mempertahankan karakteristik keagamaan mereka. Meskipun madrasah berada di bawah pengawasan Kementerian Agama, mereka diberikan otonomi terbatas dalam pengelolaan pendidikan. Madrasah memiliki kebebasan untuk mengatur kegiatan belajar mengajar, memilih guru, dan mengembangkan kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, otonomi ini sering kali dibatasi oleh regulasi pemerintah yang ketat.

Pemerintah Orde Baru melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah. Ini termasuk penetapan standar operasional dan administrasi yang harus diikuti oleh madrasah. Dengan adanya struktur yang lebih jelas, madrasah dapat lebih mudah dikelola dan diawasi oleh pemerintah.

Meskipun banyak madrasah yang dikelola oleh swasta atau masyarakat, pemerintah mulai memberikan dukungan finansial untuk pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. Bantuan ini mencakup penyediaan fasilitas pendidikan, pelatihan guru, dan pengadaan buku pelajaran. Namun, dukungan ini sering kali tidak merata, dan banyak madrasah yang masih menghadapi tantangan dalam hal pendanaan.

5) Pendidikan Islam pada Masa Reformasi

Reformasi pendidikan Islam pada era reformasi di Indonesia, yang dimulai setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, ditandai oleh perubahan signifikan dalam sistem dan kelembagaan pendidikan.

a) Sistem Pendidikan Islam

Era reformasi membawa perubahan dari sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini berdampak pada pendidikan, di mana otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Dengan adanya desentralisasi, madrasah dan pesantren memiliki lebih banyak kebebasan dalam pengelolaan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar, sesuai dengan kebutuhan lokal.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menghapus dikotomi antara sekolah umum dan madrasah. Dalam undang-undang ini, madrasah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, yang berarti bahwa mereka harus mengikuti kurikulum nasional yang sama dengan sekolah umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah dan memastikan bahwa lulusan madrasah memiliki kompetensi yang setara dengan lulusan sekolah umum.

Reformasi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan Islam melalui pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang lebih baik, dan peningkatan fasilitas pendidikan. Pemerintah memberikan dukungan finansial untuk pengembangan

Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijis/index
Email: admin@jurnalcenter.com

infrastruktur madrasah dan penyediaan sumber daya pendidikan, termasuk buku dan alat peraga.

Sistem evaluasi pendidikan diperkuat dengan adanya ujian nasional yang juga diikuti oleh madrasah. Proses akreditasi madrasah diperkenalkan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan.

b) Kelembagaan Pendidikan

Kementerian Agama tetap menjadi lembaga utama yang mengawasi pendidikan Islam, termasuk madrasah dan pesantren. Namun, dalam era reformasi, Kementerian Agama diharapkan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi pengembangan pendidikan Islam. Kementerian ini bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, memberikan pelatihan bagi guru, dan mengawasi implementasi kurikulum.

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, mulai mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan pendidikan. Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 memberikan pengakuan hukum bagi pesantren, yang sebelumnya tidak memiliki status formal dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini membuka peluang bagi pesantren untuk berpartisipasi dalam program-program pemerintah dan mendapatkan dukungan dalam pengembangan pendidikan.

Reformasi pendidikan Islam juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan di daerah mereka, termasuk dalam pengelolaan madrasah dan pesantren.

Era reformasi juga membuka peluang bagi kerjasama dengan lembaga internasional dalam pengembangan pendidikan Islam. Berbagai program bantuan dan pelatihan dari organisasi internasional membantu meningkatkan kapasitas madrasah dan pesantren dalam mengelola pendidikan yang berkualitas.

6) Reformasi Pendidikan Islam pada masa Milenial

a) Sistem Pendidikan Islam

Metode pembelajaran di era milenial semakin mengedepankan interaktivitas dan partisipasi, dengan pendekatan seperti dialog (Hiwar) dan diskusi kelompok yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Pembelajaran berbasis proyek juga semakin diterapkan, memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman langsung, seperti menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penggunaan teknologi semakin mendominasi, dengan pemanfaatan platform digital, aplikasi mobile, dan forum diskusi online, yang tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja.

Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijis/index
Email: admin@jurnalcenter.com

Kurikulum pendidikan Islam saat ini berfokus pada integrasi ilmu pengetahuan umum dengan ajaran agama untuk memberikan siswa pengetahuan yang komprehensif, sehingga mereka dapat berkontribusi positif dalam masyarakat yang kompleks. Selain itu, kurikulum juga mengutamakan pengembangan keterampilan hidup, seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama, untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia nyata dan berperan aktif dalam masyarakat.

Reformasi juga mencakup perubahan dalam sistem evaluasi. Alih-alih hanya mengandalkan ujian tertulis, penilaian kini lebih berfokus pada kompetensi dan kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Ini termasuk penilaian proyek, presentasi, dan partisipasi dalam diskusi.

b) Kelembagaan Pendidikan Islam

- ☐ Diversifikasi Lembaga Pendidikan
  - ✓ Sekolah Islam Terpadu: Sekolah Islam Terpadu (SIT) merupakan bentuk reformasi pendidikan Islam di Indonesia yang mengintegrasikan pendidikan agama dan umum melalui kurikulum holistik, sistem full day school, dan fokus pada kualitas pendidikan. SIT menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan berkualitas dengan menekankan nilai-nilai Islam dalam pembentukan karakter siswa.
  - ✓ Sekolah alam: Sekolah alam merupakan salah satu bentuk reformasi pendidikan Islam yang bertujuan untuk menciptakan format pendidikan yang lebih humanis dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks ini, sekolah alam mengintegrasikan alam sebagai ruang belajar, media, dan objek pembelajaran, yang memungkinkan siswa untuk belajar secara langsung dari lingkungan sekitar mereka.
  - ✓ Universitas dan Program Studi Keagamaan: Banyak universitas di Indonesia kini menawarkan program studi keagamaan yang lebih beragam, termasuk studi Islam kontemporer, hukum Islam, dan pendidikan agama. Ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendalami bidang yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
- ☐ Kolaborasi Antarlembaga
  - ✓ Sinergi Organisasi Keagamaan: Organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan PERSIS berkolaborasi untuk menciptakan standar pendidikan yang lebih baik. Kerjasama ini mencakup pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan penyediaan sumber daya pendidikan yang lebih baik.
  - ✓ Kemitraan dengan Sektor Swasta: Beberapa lembaga pendidikan Islam juga menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Misalnya, kerjasama dalam penyediaan fasilitas, teknologi, dan pelatihan bagi pengajar.
- ☐ Aksesibilitas dan Keterjangkauan

Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijis/index
Email: admin@jurnalcenter.com

- ✓ Program Beasiswa dan Bantuan: Untuk mengatasi masalah biaya pendidikan, banyak lembaga pendidikan Islam yang menawarkan program beasiswa dan bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan agama Islam dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- ✓ Pendidikan Jarak Jauh: Dengan kemajuan teknologi, pendidikan jarak jauh juga menjadi pilihan bagi siswa yang tidak dapat mengakses pendidikan formal secara langsung. Ini memungkinkan mereka untuk tetap mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas tanpa harus terikat pada lokasi fisik.

c) Tokoh-tokoh reformasi pendidikan islam di Indonesia

☐ Syekh Burhanuddin

Syekh Burhanudin hidup pada awal abad ke-17, khususnya sekitar tahun 1611 M ketika beliau kembali dari Aceh setelah menuntut ilmu. Pada masa itu, wilayah Minangkabau, termasuk Padang Pariaman, berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan lokal yang sedang berkembang, seperti Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan yang berpengaruh di Sumatera Barat dan memainkan peranan penting dalam sejarah dan budaya masyarakat Minangkabau.

Syekh Burhanudin melakukan pembaruan pendidikan Islam di Padang Pariaman dengan beberapa pendekatan inovatif, seperti mendirikan surau di Tanjung Medan sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjadi pusat keilmuan. Dalam pengajaran, beliau menggunakan metode yang lembut dan bertahap, mengajarkan Islam dengan cara yang menyenangkan. Beliau juga berhasil mengintegrasikan ajaran Islam dengan adat Minangkabau, menciptakan harmoni antara agama dan tradisi, serta memperkenalkan falsafah "adat bersandi syara', syara' bersandi kitabullah." Selain itu, beliau memanfaatkan tradisi ritual keagamaan, seperti peringatan Maulid Nabi, untuk menyebarkan ajaran Islam, sekaligus memperkuat identitas keagamaan masyarakat. Syekh Burhanudin juga membawa ajaran Tarekat Syattariyah sebagai bagian dari pendidikan spiritual yang memperkaya pembelajaran agama di masyarakat. Melalui pendekatan-pendekatan ini, Syekh Burhanudin tidak hanya berhasil mengembangkan pendidikan Islam, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih taat dan memahami ajaran Islam dengan baik.

☐ K.H Ahmad Dahlan

KH Ahmad Dahlan hidup pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Beliau lahir pada tahun 1868 dan aktif dalam gerakan pendidikan dan reformasi Islam pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada periode tersebut, Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan.

Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijis/index
Email: admin@jurnalcenter.com

KH Ahmad Dahlan berusaha untuk melakukan pembaruan pendidikan Islam agar dapat bersaing dengan sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Terinspirasi oleh gerakan reformasi Islam yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk pemikiran para reformis seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridha, KH Ahmad Dahlan melihat bahwa pembaruan dalam pendidikan Islam adalah suatu keharusan untuk menjawab tantangan zaman dan mengembalikan umat Islam kepada ajaran Islam yang murni dan relevan dengan konteks modern.

Beliau berupaya untuk mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, memperbaiki metode pembelajaran, serta menciptakan sistem pendidikan yang lebih modern dan relevan. Pembaruan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga untuk membentuk generasi Muslim yang berkarakter, berpengetahuan, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.

- K.H Hasyim Asy'ari

Pembaruan pendidikan Islam yang dilakukan oleh KH. Hasyim Asy'ari pada masa penjajahan Jepang (1942-1945) sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi pada saat itu.

Pada masa penjajahan Jepang, KH. Hasyim Asy'ari melihat peluang untuk memperkuat pendidikan Islam di pesantren dengan menanggapi kebijakan pendidikan Jepang yang lebih terstruktur. Ia mendorong pesantren untuk beradaptasi dengan sistem pendidikan tersebut tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Hasyim Asy'ari juga menekankan pentingnya pendidikan yang dapat membekali santri dengan keterampilan praktis dan kemandirian, seperti pertanian, kerajinan, dan perdagangan, agar mereka dapat berkontribusi pada masyarakat dan menghadapi tantangan hidup di tengah penjajahan. Ia juga mendorong peningkatan kualitas pengajaran dengan metode yang lebih interaktif dan partisipatif, agar santri lebih aktif dalam proses belajar-mengajar.

Selain itu, Hasyim Asy'ari berusaha mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum untuk memastikan santri memiliki pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman. Meskipun berada di bawah penjajahan, ia tetap menekankan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, yang bertujuan membentuk karakter dan akhlak santri. Ia juga mendorong pesantren untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, menjadi pusat pengajaran dan kegiatan sosial yang membantu masyarakat mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan. Melalui pembaruan-pembaruan ini, Hasyim Asy'ari berupaya menjadikan pendidikan Islam lebih relevan dan adaptif terhadap kondisi zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan penjajahan Jepang.

Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijis/index
Email: admin@jurnalcenter.com

- H. Abdul Karim Amarullah

Buya HAMKA, atau Haji Abdul Malik Karim Amarullah, hidup pada zaman pemerintahan yang beragam di Indonesia. Ia dilahirkan pada tanggal 17 Februari 1908 dan meninggal pada 24 Juli 1981. Selama hidupnya, HAMKA menyaksikan berbagai periode pemerintahan, mulai dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga kemerdekaan Indonesia dan masa awal Republik Indonesia.

Pembaruan Islam yang dilakukan Buya HAMKA mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan, pemikiran, dan sosial budaya. Dalam pendidikan, HAMKA mendirikan Masjid Al-Azhar di Jakarta sebagai lembaga yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, dengan tujuan membentuk karakter dan keterampilan peserta didik yang relevan dengan zaman. Sebagai penulis produktif, HAMKA menghasilkan karya seperti *Tafsir Al-Azhar* dan *Di Bawah Lindungan Ka'bah*, yang menggambarkan pemikiran progresifnya tentang Islam yang mengaitkan ajaran agama dengan konteks sosial dan budaya Indonesia.

Dalam bidang sosial dan budaya, ia mendorong umat Islam untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan pembangunan, serta mendukung dialog antaragama untuk menciptakan kedamaian. HAMKA juga menekankan relevansi ajaran Islam dalam menghadapi perubahan zaman, menjadikan Islam sebagai agama yang progresif dan adaptif, serta memberi inspirasi bagi generasi mendatang.

4. KESIMPULAN

Reformasi pendidikan Islam di Indonesia merupakan proses berkelanjutan yang dipengaruhi oleh dinamika sejarah, kebijakan pendidikan, dan tuntutan zaman. Reformasi tersebut telah membawa perubahan signifikan dalam aspek kurikulum, kelembagaan, dan metode pembelajaran. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing.

5. DAFTAR PUSTAKA

Aly, H. N., Abdullah, S., Chamami, M. R., Fihris, Yahiji, K., Supiah, Damopolii, M., Ainiyah, N., & Ritonga, A. R. (2023). Reviewing the colonial period Islamic education system in Indonesia: What is still relevant to continue. Journal of Namibian Studies: History, Politics, Culture, 33, 671–687. https://doi.org/10.59670/jns.v33i.531

Harlinda, Bahaking Rama, & Muhammad Yahdi. (2023). Pendidikan Islam pada masa awal di Indonesia. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial, 2(2), 152–160. https://doi.org/10.58540/jipsi.v2i2.352

Haryanti, N. (2013). Implementasi pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang etika pendidik. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 8(2), 439–450. https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.2.439-450

Hoddin, M. S. (2020). Dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia. Jurnal Ilmiah Iqra',

Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijis/index
Email: admin@jurnalcenter.com

14(1), 15–25. https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035

Iroh, S., Wawan, W., & Kurniawan, A. F. (2022). Reformasi pendidikan Islam: Upaya membangun konsep pendidikan Islam modern di Indonesia. Journal of Innovation Research and Knowledge, 1(9), 831–840. https://doi.org/10.53625/jirk.v1i9.1398

Mildawati, T., Sejarah, & Rama, B. (2024). Perkembangan Islam pada masa awal hingga munculnya kerajaan Islam di Aceh. Vifada Journal of Education, 2(1), 1–27. https://doi.org/10.70184/cj62pb29

Mursal. (2023). Pemikiran pendidikan Islam Buya Hamka. Kreatifitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 11(2), 101–115. https://doi.org/10.46781/kreatifitas.v11i2.638

Nursyarief, A. (2014). Pendidikan Islam di Indonesia dalam lintasan sejarah (perspektif kerajaan Islam). Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 17(2), 256–271. https://doi.org/10.24252/lp.2014v17n2a8

Rohinah. (2014). Sekolah alam: Paradigma baru pendidikan Islam humanis. Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam, 8(2), 282–294.

Sukhoiri. (2022). Sekolah Islam terpadu: Reformasi baru lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi, 2(5). https://doi.org/10.59818/jpi.v2i5.246

Suryanegara, A. M. (2014). Api sejarah (N. Kurniawati, Ed.; Cetakan ke-1). Bandung: CV. Tria Pratama.

Syahril, & Marjoni, D. (2021). Jejak perjuangan Syekh Burhanudin dalam mengembangkan ajaran Islam di Kabupaten Padang Pariaman. Tarikhuna: Journal of History and History Education, 4(1), 84–98. https://doi.org/10.15548/thje.v3i1.2947

Wibowo, R. (2023). Reformasi pendidikan agama Islam di Indonesia pada era millennial. Al-Aufa: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, 5(2), 134–153. https://doi.org/10.32665/alaufa.v5i2.1689